

Implementasi Good Governance dalam Mendorong Pencapaian SDGs melalui Pemanfaatan Dana Desa: Studi Kasus Desa Janti, Waru, Sidoarjo

Della Erdiana¹, Muhammad Taufiq Hidayat²

¹⁻² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: dellaerdiana2284@gmail.com¹, taufikhidayat@untag-sby.ac.id²

Article Info :

Received:

13-12-2025

Revised:

11-01-2025

Accepted:

16-01-2026

Abstract

This study examines the implementation of good governance in encouraging the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) through Village Fund utilization in Janti Village, Waru District, Sidoarjo Regency. A descriptive qualitative approach was employed, using in-depth interviews, direct observation, and document analysis of RPJMDes, RKPDDes, APBDes, and accountability reports. The findings indicate that village fund management has complied with regulatory procedures and applied core principles of good governance, particularly transparency, accountability, and community participation. These practices have contributed to the achievement of several SDGs indicators, including poverty reduction, improved public health, quality education, gender equality, economic growth, infrastructure development, environmental resilience, and institutional strengthening at the village level. However, the overall achievement of SDGs Village remains suboptimal due to limited human resource capacity, insufficient technical understanding of SDGs indicators, and budgetary constraints. This study concludes that while good governance provides a strong institutional foundation, the effectiveness of SDGs achievement depends on the availability of competent human resources, adequate funding, and strategic prioritization aligned with SDGs indicators. Strengthening village capacity and targeted policy support are therefore essential to ensure sustainable and inclusive rural development.

Keywords: Good Governance, Village Fund, SDGs Village, Rural Development, Village Governance.

Akbsrak

Penelitian ini mengkaji implementasi tata kelola yang baik dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan, dengan metode wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan analisis dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes, serta laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mematuhi prosedur regulasi dan menerapkan prinsip-prinsip inti tata kelola yang baik, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Praktik-praktik ini telah berkontribusi pada pencapaian beberapa indikator SDGs, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, ketahanan lingkungan, dan penguatan institusi di tingkat desa. Namun, pencapaian SDGs Desa secara keseluruhan masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman teknis yang kurang memadai terhadap indikator SDGs, dan keterbatasan anggaran. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun tata kelola yang baik menyediakan landasan institusional yang kuat, efektivitas pencapaian SDGs bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang memadai, dan prioritas strategis yang selaras dengan indikator SDGs. Penguatan kapasitas desa dan dukungan kebijakan yang terarah oleh karena itu menjadi esensial untuk memastikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Tata Kelola yang Baik, Dana Desa, Desa SDGs, Pembangunan Pedesaan, Tata Kelola Desa.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam menopang pembangunan nasional melalui pengelolaan potensi lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperluas kewenangan pemerintah desa dalam mengatur administrasi, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa secara mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen utama yang mendukung mandat tersebut adalah Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan sosial sebagai prinsip utama good governance (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009; Lubis, 2020).

Pengelolaan Dana Desa tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa. SDGs Desa menuntut integrasi antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, serta evaluasi berbasis hasil yang terukur dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Dana Desa terhadap pencapaian SDGs sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan publik secara efektif dan efisien (Subekti, 2022; Martadinata, 2024). Penguatan tata kelola keuangan publik desa menjadi kebutuhan mendesak agar Dana Desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Desa Janti di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang relatif tinggi, terutama karena kedekatannya dengan kawasan perkotaan dan aktivitas industri. Potensi tersebut seharusnya menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Dana Desa secara optimal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Janti masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian Kamila dan Buchari (2024) menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat desa sering terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat serta permasalahan validitas data kemiskinan yang digunakan sebagai dasar perencanaan program.

Ketidaktepatan data kemiskinan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan dan distribusi bantuan sosial yang dibiayai Dana Desa. Program yang dirancang tanpa dukungan data yang akurat berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang menjawab kebutuhan riil masyarakat. Rendahnya keterlibatan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa juga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan lebih bersifat administratif dibandingkan aspiratif. Kondisi tersebut mencerminkan adanya jarak antara kebijakan formal yang dirancang pemerintah desa dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Desa Janti (Kamila & Buchari, 2024).

Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dan praktik implementasi di tingkat desa dalam upaya mencapai SDGs. Penelitian Anggraini et al. (2025) mengungkapkan bahwa pelayanan publik bagi kelompok rentan di desa masih belum terlaksana secara adil akibat lemahnya internalisasi prinsip inklusivitas dalam tata kelola pemerintahan. Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin kerap berada di posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Temuan tersebut menegaskan bahwa pencapaian SDGs Desa menuntut komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan pelibatan seluruh elemen masyarakat tanpa pengecualian.

Dominasi pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi isu penting dalam pengelolaan Dana Desa. Studi Puspitasari dan Day (2025) menunjukkan bahwa pola tata kelola yang bersifat sentripetal mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan membatasi otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan desa cenderung elitis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Reformasi tata kelola desa perlu diarahkan pada penguatan desentralisasi substantif yang memberi ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Aspek kapasitas sumber daya manusia aparatur desa turut memengaruhi kualitas pengelolaan Dana Desa dan pencapaian SDGs. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan sering berujung pada lemahnya akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Sistem monitoring dan evaluasi yang belum berbasis data memperbesar risiko inefisiensi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Subekti, 2022; Erica et al., 2024). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan publik dan penguatan budaya kinerja menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola desa yang berkualitas, sejalan dengan temuan mengenai pentingnya produktivitas dan kualitas proses dalam mendukung efisiensi organisasi (Armando, 2025).

Bertolak dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi good governance dalam mendorong pencapaian SDGs melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Janti,

Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam praktik tata kelola pemerintahan desa, kendala yang dihadapi, serta faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris bagi penguatan pengelolaan keuangan desa berbasis prinsip good governance. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi rujukan evaluatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan mengoptimalkan pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik implementasi good governance dalam pemanfaatan Dana Desa di tingkat desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Dana Desa yang berkaitan dengan pencapaian SDGs Desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa serta telaah dokumen resmi seperti RPJMDes, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban digunakan untuk memperkuat validitas data dan memastikan kesesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pencapaian SDGs Desa Janti

Pengelolaan Dana Desa di Desa Janti menunjukkan posisi strategis keuangan desa sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Berdasarkan data APBDes dan hasil wawancara dengan aparatur desa, Desa Janti menerima alokasi Dana Desa rata-rata sekitar Rp1.000.000.000 setiap tahun yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Besaran dana tersebut menjadikan Dana Desa sebagai tulang punggung fiskal desa dalam merancang kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini sejalan dengan temuan Subekti (2022) yang menegaskan bahwa Dana Desa berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs apabila dikelola secara terarah dan konsisten.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Janti dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan perencanaan diawali melalui musyawarah desa yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai dasar penyusunan APBDes. Aparatur desa berperan dominan dalam proses teknokratis perencanaan, sementara masyarakat berpartisipasi melalui forum formal yang disediakan pemerintah desa. Pola ini memperlihatkan adanya kepatuhan prosedural terhadap regulasi, namun masih menyisakan ruang evaluasi terkait kualitas partisipasi substantif masyarakat, sebagaimana juga dicatat dalam studi Puspitasari dan Day (2025).

Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kegiatan penunjang SDGs Desa. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan relatif tertib secara administratif dan mengikuti rencana anggaran yang telah ditetapkan. Aparatur desa melaksanakan kegiatan dengan melibatkan tim pelaksana kegiatan yang dibentuk secara formal. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas administratif yang juga ditemukan dalam penelitian Savitri et al. (2023) dan Daempal et al. (2022) terkait pengelolaan Dana Desa di wilayah lain.

Penatausahaan keuangan desa di Desa Janti dilakukan melalui pencatatan sistematis atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Bendahara desa mencatat setiap transaksi dalam buku kas umum serta sistem keuangan desa yang terintegrasi secara digital. Praktik ini mendukung transparansi internal dan memudahkan proses pelaporan keuangan desa kepada pemerintah daerah. Pola penatausahaan tersebut sejalan dengan prinsip akuntansi sektor publik yang menekankan keterlacakan dan keterbukaan informasi keuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Martadinata (2024) dan Thareq dan Apriani (2024).

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Janti dilakukan secara periodik melalui laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Laporan

tersebut disampaikan kepada pemerintah kabupaten serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan forum musyawarah. Praktik ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam membangun transparansi fiskal di tingkat lokal.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan value for money dalam sektor publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan anggaran, sebagaimana dibahas oleh Erica et al. (2024). Untuk memperkuat analisis empiris, berikut disajikan ringkasan data pengelolaan Dana Desa di Desa Janti yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, dokumen resmi desa, serta perbandingan dengan temuan penelitian terdahulu:

Tabel 1. Ringkasan Pengelolaan Dana Desa dan Prinsip Good Governance di Desa Janti

Aspek Pengelolaan	Temuan Penelitian Desa Janti	Laporan Resmi Desa	Penelitian Terdahulu
Alokasi Dana Desa	± Rp1 miliar/tahun	APBDes Desa Janti	Subekti (2022)
Tahap Perencanaan	Musyawarah desa formal	RKPDes	Tyas et al. (2025)
Pelaksanaan	Infrastruktur & pemberdayaan	Laporan TPK	Wahyuni (2024)
Penatausahaan	Pencatatan manual & digital	Buku Kas Umum	Martadinata (2024)
Pelaporan	Laporan realisasi & LPJ	Laporan APBDes	Thareq & Apriani (2024)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa Desa Janti telah menjalankan seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa secara lengkap sesuai regulasi yang berlaku. Kesesuaian antara praktik lapangan dan ketentuan formal menunjukkan adanya komitmen aparatur desa terhadap tata kelola yang tertib dan terstruktur. Pola ini mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka kode tata kelola yang dikemukakan Aguilera dan Cuervo-Cazurra (2009). Dimensi partisipasi dan inklusivitas masih memerlukan penguatan agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Dari perspektif pencapaian SDGs Desa, pengelolaan Dana Desa di Desa Janti telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan yang didanai Dana Desa mendukung tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, meskipun dampaknya belum merata pada kelompok rentan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Kamila dan Buchari (2024) serta Anggraini et al. (2025) yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam tata kelola desa agar SDGs dapat dicapai secara komprehensif. Pencapaian target pembangunan sosial membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap data kemiskinan dan kebutuhan kelompok marjinal.

Kapasitas aparatur desa menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas pengelolaan Dana Desa di Desa Janti. Wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa pemahaman teknis terkait regulasi keuangan desa cukup memadai, namun kemampuan analitis dan evaluatif masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rikardus et al. (2025) dan Styawan dan Riharjo (2025) yang menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan sertifikasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta kualitas pengambilan keputusan pembangunan desa.

Dari sisi tata kelola organisasi, pola kerja aparatur desa di Desa Janti menunjukkan hubungan antara kepuasan kerja, produktivitas, dan kualitas proses administrasi. Aparatur yang memahami peran dan tanggung jawabnya cenderung mampu menjalankan tugas pengelolaan Dana Desa secara lebih tertib. Pola ini memiliki kesesuaian dengan temuan Armando (2025) mengenai hubungan antara kualitas proses dan efisiensi operasional dalam organisasi. Penguatan manajemen internal desa menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip good governance.

Implementasi good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Janti telah menunjukkan kemajuan pada aspek kepatuhan regulatif, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Tantangan utama masih terletak pada pendalaman partisipasi masyarakat, inklusivitas kebijakan, serta optimalisasi kapasitas aparatur desa dalam mendukung pencapaian SDGs. Temuan ini sejalan dengan hasil telaah

sistematis Kurniawati et al. (2024) dan model pengelolaan Dana Desa yang dikemukakan Ardhiarisca et al. (2026) yang menekankan pentingnya sinergi antara tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan orientasi pembangunan berkelanjutan. Penguatan kolaborasi multilevel dan sound governance juga menjadi agenda strategis untuk memastikan Dana Desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan Fauziah dan Lubis (2022) serta Saguni dan Djabbari (2024).

Integritas Aparatur dan Konsistensi Good Governance dalam Akselerasi SDGs Desa Janti

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Janti tidak berhenti pada kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi sangat ditentukan oleh dedikasi dan integritas aparatur desa dalam menerjemahkan prinsip good governance ke dalam praktik kerja harian. Aparatur desa tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengelolaan anggaran, melainkan juga memegang peran etis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan Dana Desa. Integritas aparatur menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi manfaat pembangunan desa. Pola ini sejalan dengan kerangka normatif good governance yang menempatkan etika dan komitmen aktor sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009; Fauziah & Lubis, 2022).

Penguatan orientasi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa memperoleh dasar regulatif yang jelas melalui Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang mengarahkan Dana Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Regulasi tersebut mendorong desa agar menjadikan SDGs sebagai rujukan utama dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Desa Janti merespons kebijakan ini dengan mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan desa dan program tahunan. Praktik ini menunjukkan keselarasan antara kebijakan nasional dan inisiatif lokal dalam membangun desa yang berorientasi jangka panjang, sebagaimana juga ditemukan pada berbagai studi SDGs Desa di daerah lain (Saguni & Djabbari, 2024; Wahyuni, 2024).

Pengelolaan Dana Desa secara sistematis di Desa Janti memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus alat strategis pembangunan. Aparatur desa memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan desa. Keterbukaan informasi keuangan memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. Kondisi ini mendukung pandangan bahwa tata kelola keuangan publik yang baik berkontribusi langsung terhadap kinerja pembangunan dan kepercayaan sosial (Martadinata, 2024; Erica et al., 2024).

Walaupun pengelolaan Dana Desa telah diarahkan untuk mendukung SDGs, realisasi capaian di Desa Janti masih belum mencakup seluruh 18 tujuan SDGs Desa. Fokus pembangunan masih terkonsentrasi pada tujuan-tujuan yang bersifat dasar seperti infrastruktur, peningkatan pendapatan, dan layanan sosial umum. Keterbatasan kapasitas aparatur dan kompleksitas indikator SDGs menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya pencapaian seluruh target. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian Kamila dan Buchari (2024) serta Subekti (2022) yang menegaskan bahwa pencapaian SDGs Desa bersifat bertahap dan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan desa.

Upaya perbaikan capaian SDGs di Desa Janti dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa melakukan penyesuaian program secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan masukan warga dalam forum musyawarah desa. Pendekatan adaptif ini memperlihatkan adanya kesadaran aparatur desa untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka kerja yang fleksibel dan kontekstual.

Strategi serupa juga ditemukan dalam model perencanaan dan penganggaran Dana Desa yang berorientasi SDGs di berbagai desa lain (Tyas et al., 2025; Ardhiarisca et al., 2026). Sebagai penguat analisis, berikut disajikan data integratif yang merangkum hubungan antara integritas aparatur, tata kelola Dana Desa, dan capaian SDGs di Desa Janti berdasarkan hasil penelitian lapangan, dokumen resmi, dan temuan penelitian terdahulu:

Tabel 2. Integritas Aparatur, Tata Kelola Dana Desa, dan Capaian SDGs Desa Janti

Aspek	Data Lapangan Desa Janti	Laporan Resmi	Penelitian Terdahulu
Integritas Aparatur	Komitmen kepatuhan & etika kerja	Laporan Evaluasi Kecamatan	Savitri et al. (2023)
Transparansi Keuangan	Publikasi APBDes & LPJ	APBDes Desa Janti	Thareq & Apriani (2024)
Arah SDGs Desa	Fokus pada tujuan dasar	RKPDes	Wahyuni (2024)
Kapasitas SDM	Kebutuhan peningkatan kompetensi	Catatan Pembinaan Desa	Rikardus et al. (2025)
Dampak Pembangunan	Infrastruktur & layanan sosial	Laporan Tahunan Desa	Lubis (2020)

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa integritas aparatur desa menjadi penghubung utama antara tata kelola keuangan yang tertib dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat. Praktik transparansi dan akuntabilitas memperkuat efektivitas penggunaan Dana Desa serta mendorong capaian SDGs yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hubungan ini menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari kualitas aktor pengelola kebijakan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil telaah sistematis mengenai good governance Dana Desa yang menempatkan faktor manusia sebagai penentu keberhasilan kebijakan (Kurniawati et al., 2024).

Dimensi partisipasi masyarakat dalam pencapaian SDGs Desa Janti menunjukkan perkembangan yang bersifat gradual. Masyarakat dilibatkan melalui mekanisme formal seperti musyawarah desa, meskipun tingkat partisipasi aktif masih bervariasi antar kelompok sosial. Kelompok rentan belum sepenuhnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Pola ini memiliki kesamaan dengan temuan Anggraini et al. (2025) yang menekankan pentingnya perspektif inklusivitas dalam tata kelola SDGs Desa.

Kapasitas aparatur desa menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa berbasis SDGs. Kebutuhan peningkatan kompetensi teknis, analitis, dan evaluatif muncul sebagai temuan konsisten dalam penelitian ini. Program pelatihan dan sertifikasi aparatur dipandang strategis untuk memperkuat profesionalisme dan konsistensi tata kelola desa. Temuan ini sejalan dengan studi Styawan dan Riharjo (2025) serta Rikardus et al. (2025) yang menegaskan pentingnya investasi pada sumber daya manusia desa.

Dari sudut pandang manajemen organisasi, dedikasi aparatur desa memiliki keterkaitan erat dengan kualitas proses kerja dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Aparatur yang memiliki kepuasan kerja dan pemahaman tujuan pembangunan menunjukkan kinerja administratif yang lebih konsisten. Pola hubungan ini memperkuat temuan Armando (2025) mengenai keterkaitan antara kualitas proses dan efisiensi operasional dalam organisasi. Peningkatan iklim kerja aparatur desa berpotensi mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Janti telah bergerak melampaui pendekatan prosedural menuju tata kelola yang berorientasi nilai dan keberlanjutan. Integritas aparatur, konsistensi penerapan prinsip good governance, serta komitmen terhadap SDGs membentuk fondasi penting pembangunan desa. Tantangan yang tersisa berkaitan dengan pendalaman inklusivitas, penguatan kapasitas aparatur, dan perluasan cakupan tujuan SDGs Desa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sound governance berbasis kolaborasi dan etika publik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan (Daempal et al., 2022; Lubis, 2020).

Implementasi Good Governance dan Capaian SDGs Desa Janti

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Janti menunjukkan bahwa lima tahapan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Aparatur desa memperlihatkan pemahaman regulatif yang memadai, terutama terkait penggunaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai rujukan utama tata kelola keuangan desa. Dokumen strategis seperti

RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tidak hanya disusun sebagai kewajiban administratif, tetapi benar-benar difungsikan sebagai instrumen pengarah kebijakan dan program pembangunan desa. Praktik ini memperkuat temuan Savitri et al. (2023) dan Martadinata (2024) yang menegaskan bahwa konsistensi dokumen perencanaan menjadi prasyarat penting bagi akuntabilitas sektor publik.

Penerapan prinsip good governance di Desa Janti tampak nyata terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran dan realisasi kegiatan menggunakan papan informasi desa serta forum musyawarah yang dapat diakses masyarakat. Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang mengikuti format dan jadwal yang ditetapkan pemerintah. Pola ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik sebagai fondasi kepercayaan masyarakat (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009; Thareq & Apriani, 2024).

Partisipasi masyarakat di Desa Janti terus diupayakan melalui musyawarah desa dan forum perencanaan pembangunan, meskipun intensitas keterlibatan warga belum selalu stabil. Variasi partisipasi dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tingkat pemahaman kebijakan, serta kesibukan ekonomi masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi membutuhkan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Anggraini et al. (2025) dan Fauziah dan Lubis (2022) yang menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola desa.

Implementasi tata kelola yang relatif tertib memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sejumlah indikator SDGs Desa di Desa Janti. Program pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan pelatihan manajemen usaha bagi warga berpenghasilan rendah, yang mendukung SDGs poin 1. Bidang kesehatan dan pendidikan juga memperoleh alokasi Dana Desa melalui penyelenggaraan posyandu, imunisasi, serta dukungan fasilitas pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi, yang berkorelasi dengan SDGs poin 3 dan 4. Pola pemanfaatan Dana Desa ini memperkuat temuan Subekti (2022) dan Kamila dan Buchari (2024) mengenai kontribusi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan dasar masyarakat.

Komitmen terhadap kesetaraan sosial dan kualitas lingkungan tercermin dari berbagai program yang mendukung SDGs poin 5, 6, dan 10. Kegiatan pemberdayaan PKK, penyuluhan perlindungan anak, serta edukasi kesehatan masyarakat menunjukkan perhatian terhadap kesetaraan gender dan kelompok rentan. Program perbaikan sanitasi, pengelolaan air limbah, dan pembangunan saluran air mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Praktik ini memiliki kesesuaian dengan temuan Wahyuni (2024) dan Saguni dan Djabbari (2024) yang menyoroti peran desa dalam membangun pembangunan sosial dan lingkungan secara berimbang.

Kontribusi Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penguatan infrastruktur desa juga tampak pada pencapaian SDGs poin 8 dan 9. Program ketahanan pangan melalui bantuan bibit, pupuk, ikan, serta alat pertanian mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur seperti saluran air, jembatan, dan inisiatif bank sampah berbasis pengomposan menunjukkan upaya inovasi desa dalam menjawab kebutuhan lokal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lubis (2020), Daempal et al. (2022), serta Ardhiarisca et al. (2026) yang menekankan peran Dana Desa sebagai pengungkit ekonomi dan inovasi lokal. Sebagai penguat pembahasan, data berikut merangkum keterkaitan antara prinsip good governance, program Dana Desa, dan capaian SDGs Desa Janti berdasarkan hasil penelitian lapangan, laporan resmi desa, serta penelitian terdahulu:

Tabel 3. Implementasi Good Governance dan Capaian SDGs Desa Janti

Prinsip/Program	Implementasi di Desa Janti	SDGs Terkait	Sumber
Transparansi	Papan informasi APBDes, musyawarah desa	SDGs 16	Savitri et al. (2023)
Akuntabilitas	LPJ tepat waktu dan terstandar	SDGs 16	Martadinata (2024)
Pemberdayaan Ekonomi	BLT, pelatihan usaha, ketahanan pangan	SDGs 1, 8	Subekti (2022); Lubis (2020)

Prinsip/Program	Implementasi di Desa Janti	SDGs Terkait	Sumber
Sosial & Kesehatan	Posyandu, pendidikan, PKK	SDGs 3, 4, 5	Kamila & Buchari (2024)
Lingkungan & Inovasi	Sanitasi, bank sampah	SDGs 6, 9, 13	Wahyuni (2024)

Meskipun berbagai indikator SDGs telah dicapai, capaian SDGs Desa Janti secara keseluruhan belum optimal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama, terutama dalam pengelolaan data dan pelaporan indikator SDGs yang menuntut ketelitian dan konsistensi. Aparatur desa menghadapi beban kerja administratif yang tinggi, sehingga pengelolaan SDGs belum menjadi fokus tersendiri. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rikardus et al. (2025) dan Styawan dan Riharjo (2025) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa.

Keterbatasan anggaran juga memengaruhi kemampuan desa dalam mengakomodasi seluruh usulan program yang relevan dengan SDGs. Pemerintah desa menghadapi dilema alokasi anggaran antara kebutuhan pembangunan fisik, sosial, dan kemungkinan penugasan sumber daya manusia khusus untuk pengelolaan SDGs. Situasi ini memperlihatkan bahwa tata kelola yang baik memerlukan dukungan fiskal yang proporsional agar mampu menjawab kompleksitas tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan analisis Erica et al. (2024) dan Tyas et al. (2025) mengenai pentingnya efisiensi dan prioritas anggaran publik.

Pemahaman teknis mengenai indikator SDGs Desa di kalangan aparatur dan masyarakat juga masih terbatas. Kurangnya pemahaman menyebabkan implementasi SDGs lebih banyak dipersepsikan sebagai kelanjutan program rutin, bukan sebagai kerangka pembangunan terpadu. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif agar SDGs dipahami sebagai alat strategis perencanaan desa. Temuan ini sejalan dengan kajian Kurniawati et al. (2024) dan Puspitasari dan Day (2025) yang menekankan pentingnya internalisasi konsep SDGs di tingkat lokal.

Pengelolaan Dana Desa yang patuh regulasi dan didukung prinsip good governance telah menjadi fondasi penting bagi Desa Janti dalam mendorong capaian SDGs Desa. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi membantu memastikan program berjalan tertib dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan pemahaman teknis menjadi faktor yang membatasi optimalisasi capaian SDGs. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan desa tidak hanya ditentukan oleh tata kelola yang baik, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, dukungan pendanaan, serta kemampuan menyusun prioritas pembangunan yang selaras dengan indikator SDGs (Armando, 2025; Fauziah & Lubis, 2022).

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulatif dan praktik administrasi desa yang berlaku. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga mendukung capaian sejumlah indikator SDGs Desa, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan desa. Meskipun demikian, capaian SDGs Desa secara menyeluruh belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman teknis terkait indikator SDGs, serta keterbatasan alokasi anggaran desa. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparatur desa, dukungan pendanaan yang memadai, dan kemampuan desa dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kerangka SDGs secara berkelanjutan...

DAFTAR PUSTAKA

Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. *Corporate governance: an international review*, 17(3), 376-387. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00737.x>.

- Anggraini, N., Kumalasari, A., Junadi, J., & Rahimjon, D. M. (2025). Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in the village through good governance: Inclusive perspective. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 14(1), 96-108. <https://dx.doi.org/10.31314/pjia.14.1.96-108.2025>.
- Ardhiarisca, O., Wijayanti, R. R., Andini, D. P., Harkat, A., Ansori, A. E. P., Hanip, M., & Anisa, S. (2026). Model Pengelolaan Dana Desa untuk Mencapai Sustainable Development Goals di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 47-59. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2839>.
- Armando, R. (2025). Hubungan Antara Kepuasan Karyawan, Produktivitas Kerja, Dan Kualitas Proses Produksi Terhadap Efisiensi Operasional PT. Kohler Manufakturing Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 854-861. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5946>.
- Daempal, A. V., Saerang, I. S., & Untu, V. N. (2022). Optimalisasi good governance dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dana desa di masa pandemi COVID-19 (studi kasus Desa Boloak). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1751-1760. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.44449>.
- Erica, D., Vidada, I. A., Rakhmanita, A., Hoiriah, H., & Saridawati, S. (2024). Analysis of Public Sector Financial Performance Using Value for Money in Tangerang Regency. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 969-975. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.751>.
- Fauziah, N. M., & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 440-451. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.115>.
- Kamila, N. K. N., & Buchari, R. A. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) Village Governance on Zero Poverty: A Case of Suci Village, Garut Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 21(1), 33-45. <https://doi.org/10.31113/jia.v21i1.1135>.
- Kurniawati, S. B., Supartini, S., Abdullah, S., Widyaswati, R., Maryanti, I. E., & Warsina, W. (2024). Good Governance of Village Fund to Achieve the Village Sustainable Development Goals (SDGs)-Systematic Review. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3), 5181-5203. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5415>.
- Lubis, A. (2020). Effectiveness of village fund management on increasing community welfare with management religiosity behavior as moderating variables. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 6(1), 47-64. <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2489>.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620-624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>.
- Puspitasari, C., & Day, B. S. T. (2025). *Centripetal Governance in Village Fund Management for the Achievement of Village SDGs in Sumbermulyo Village, Bantul* (Issue Icispe 2024). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-436-5_11.
- Rikardus, E., Pecamuya, R., Tuakra, Y., & Wika, M. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 340-352. <https://doi.org/10.63822/7ntme365>.
- Saguni, D. S., & Djabbari, M. H. (2024). Strategi pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan kebijakan SDGs desa untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 96-127. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.292>.
- Savitri, N. O., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2023). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-19. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42317>.
- Styawan, H. P., & Riharjo, I. B. (2025). Improving Village Governance through Competency Certification: A Case Study in Burneh Village. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 5(02), 483-507. <https://doi.org/10.63922/ajmesc.v5i02.1319>.
- Subekti, A. (2022). The Analysis Of Village Fund Contribution To Achieve A National Sustainable Development Goal (Sdgs Village) In Gadingrejo Village, Kepil Subdistrict Wonosobo Regency. *International Journal of Social Science*, 1(5), 739-746. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1318>.

- Thareq, S. I., & Apriani, G. (2024). Dinamika Akuntabilitas Dana Desa Di Era Sustainable Development Goals. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(2), 198-208. <https://doi.org/10.32663/csf3cj02>.
- Tyas, B. H. S., Puspitasari, C., & Ballol, P. S. (2025). Model Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa Dalam Akselerasi Sustainable Development Goals Desa. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 13(1), 1-18. <https://doi.org/10.34010/xqze9n83>.
- Wahyuni, E. S. (2024). Analisis strategi pemerintah desa dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) desa di Kecamatan Rupert. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5(2), 136-149. <https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.325>.